

Kendala dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Jawa Tengah dan Strategi Penanganannya

Nurkolis Siri Kastawi,¹✉ Suwarno Widodo,² Eko Retno Mulyaningrum³

¹Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI, Semarang, Indonesia

²Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas PGRI, Semarang, Indonesia

³Pendidikan Biologi, Universitas PGRI, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/ijcets.v3i1.8675>

Article History

Received : August 2017

Accepted : September 2017

Published : November 2017

Keywords

Budgeting; curriculum management; teacher readiness; teacher training program

Abstrak

Artikel ini menggambarkan implementasi Kurikulum 2013 di wilayah Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, dan Kebumen dilihat dari sisi kesiapan guru, dukungan sekolah dan Pemerintah Daerah, faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed method*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada beberapa daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Di sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 guru yang melaksanakan pembelajaran tematik, saintifik, dan penilaian otentik tak lebih dari 50%. Hal tersebut diidentifikasi karena (1) guru belum siap mengimplementasikannya, (2) dukungan sekolah masih rendah, (3) walau Pemerintah Daerah sudah mengalokasikan anggaran, namun belum optimal penggunaannya, (4) ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat pada diri guru, pimpinan sekolah, dan Dinas Pendidikan, termasuk koordinasi yang masih lemah antarpihak terkait.

Abstract

This article describes the implementation of Curriculum 2013 in Central Java, focusing on Semarang City, Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, and Kebumen districts in terms of teacher readiness, the school and local district support, its supportive and barrier factors, and the strategies to handle those problems. This research using mixed method and the result indicated that the implementation of Curriculum 2013 in several districts in Central Java is not effective yet. Half of teachers in schools that implemented Curriculum 2013 cannot implement thematic and scientific learning approach and authentic assessment. This problem happens because (1) most of teacher are not ready to implement the new curriculum, (2) low school support, (3) even the local district allocate the financial support, but still not optimal in use, and (4) there are several supportive and barrier factors from the teacher itself, school managerial/leadership, and the local department of education, including the low coordination among stakeholders.

✉ Corresponding author :

Address: : Jl. Lingga Raya No. 6 Dr. Cipto Semarang, Indonesia

Surabaya, 50125

E-mail: nurkolis@upgris.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap terjadi perubahan selalu ada pro dan kontra dan sering terjadi kegelisahan di dunia pendidikan. Demikian pula setiap terjadi perubahan dan pengembangan kurikulum, selalu terjadi tantangan dalam implementasinya. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan segala dimensinya. Pengembangan dan pembaharuan kurikulum merupakan proses dinamis dan berkesinambungan yang merefleksikan kebutuhan dan aspirasi peserta didik, memberikan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban belajar, potensi siswa, sarana pendukung, serta keadaan lingkungan (Samsudi, 2009). Demikian juga perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 merupakan proses dinamis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Namun sering kali beberapa pihak menaruh curiga terhadap perubahan dan pengembangan kurikulum yang terjadi berdekatan dengan pergantian kepemimpinan nasional. Bisa diindikasikan bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perubahan kekuasaan nasional. Kecurigaan ini bukan tanpa alasan, karena kurikulum tidak bisa dielakkan dari kekuasaan. Pihak yang sedang berkuasalah yang akan menentukan kurikulum, dan pihak yang menentukan kurikulumlah yang akan mewarnai proses pendidikan di suatu negara.

Menurut Abong (2015, pp. 44-45) konstelasi kekuasaan dalam perumusan kurikulum pendidikan memang realita yang tidak terbantahkan. Bahkan sah-sah saja asalkan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi suatu bangsa. Karena memang perkembangan pengetahuan dan kebutuhan kompetensi bidang kerja menuntut penyesuaian kurikulum. Tetapi menurutnya perubahan kurikulum hendaknya dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Bukan dilakukan karena kepentingan kekuasaan sesaat, kepentingan kelompok, apalagi ada motif bisnis. Lalu muncul pertanyaan, apakah perubahan Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 telah dilakukan secara sistematis, terencana, dan terukur?

Perubahan dan pengembangan kurikulum menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh (Dikbud, 2013) dilatarbelakangi adanya perubahan zaman khususnya terkait sistem pendidikan, maka kuriku-

lum harus selalu ikut menyesuaikan. Perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 diharapkan dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia menghadapi globalisasi dunia. Bahkan menurut M. Nuh, perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 sudah melalui proses panjang dan ditelaah secara seksama. Dengan segala konsekuensinya, perubahan Kurikulum 2013 harus dilakukan jika tidak ingin sumber daya manusia Indonesia tertinggal.

Pemerintah mengubah kurikulum sekolah dengan menekankan aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif melalui penilaian berbasis tes dan portofolio yang saling melengkapi. Basis perubahan Kurikulum 2013 terdiri dari dua komponen besar, yakni pendidikan dan kebudayaan. Adapun orientasi pengembangan Kurikulum 2013 adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, disamping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Perubahan yang paling mendasar adalah pendidikan berbasis *science* dan tidak berbasis hafalan (Dikbud, 2013). Faktor lain juga menjadi alasan perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 yaitu: tantangan masa depan, kompetensi masa depan, fenomena sosial yang mengemuka, dan persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini menitikberatkan pada aspek kognitif.

Perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada penjelasan pasal 35 dinyatakan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sebenarnya hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu (Yusuf, 2013).

Pada Kurikulum 2013 aspek sikap menjadi prioritas utama karena disadari bahwa berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum berasal dari lemahnya sikap masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan yang baik pada masyarakat, namun mereka tidak memiliki sikap yang

baik akan merusak tatanan masyarakat. Pembentukan aspek sikap tersebut oleh pemerintah disebut sebagai pembentukan karakter masyarakat seperti dalam wujud kejujuran, tanggung jawab, integritas, toleransi, dan lain sebagainya.

Setiap terjadi perubahan kurikulum, guru adalah pihak yang paling terkena dampaknya. Perubahan kurikulum berarti perubahan bahan ajar dan pendekatan yang digunakan. Berarti guru harus membuat persiapan yang baru menyesuaikan kurikulum yang berubah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi dialami para guru di berbagai belahan dunia. Di Selandia Baru misalnya, para guru sejarah harus bekerja keras untuk mempersiapkan materi baru ketika terjadi perubahan kebijakan terkait mata pelajaran sejarah (Ormond, 2016, p. 599). Demikian pula di Indonesia, setiap perubahan kurikulum juga akan berdampak langsung kepada guru. Oleh karena penting untuk mengetahui kesia-pan guru dalam implementasi Kurikulum 2013.

Kurikulum pendidikan baru ini telah di-terapkan pada tahun ajaran 2013/2014. Pada saat penelitian ini dilakukan, sudah memasuki tahun keempat, seharusnya semua sekolah sudah me-nerapkan Kurikulum 2013. Artinya perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 saat ini telah mencapai tahap implementasi di seluruh daerah di Indonesia, yang pada hakikatnya telah mem-berikan gambaran hasil sesuai dengan konteks lingkungan Kurikulum 2013 tersebut diterapkan. Pada awal-awal implementasi masih disebut uji coba dan hasil ujicoba juga merupakan rujukan penting yang menggambarkan seberapa jauh kriteria hasil pendidikan yang diharapkan dapat dicapai, faktor-faktor pendukung dan pengham-bat/kendala, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, diper-lukan suatu studi secara komprehensif. Studi ini juga merupakan upaya untuk memberikan justi-fikasi terhadap signifikansi hasil ujicoba Kuriku-lum 2013 yang telah dilakukan di lapangan.

Penelitian mengenai implementasi Kuriku-lum 2013 telah dilakukan berbagai pihak dengan hasil yang bervariasi. Berdasarkan pene-litian Melati dan Utanto (2016, p. 1) implemen-tasi Kurikulum 2013 belum berjalan efektif karena guru belum memiliki pengetahuan yang cukup. Hasil penelitian Siambaton, Erlinawati, dan Haryanto (2016, p. 10) juga menunjukkan bah-wa implementasi Kurikulum 2013 belum efektif karena para guru belum mampu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) den-

gan baik. Ruja dan Sukamto (2015, p. 199) yang meneliti kesiapan guru pengampu mata pelajar-an Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dalam imple-mentasi Kurikulum 2013 juga menunjukkan be-lum efektif implementasinya.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2014, p. 71) menunjukkan bah-va implementasi Kurikulum 2013 belum efektif karena belum sesuai dengan tuntutan sekolah bahkan kurikulum baru ini relatif menyulitkan pada guru. Subekti dan kawan-kawan (2016) yang meneliti pemahaman guru Teknologi Infor-masi dan Teknologi (TIK) mengenai Kurikulum 2013 menyimpulkan bahwa para guru TIK yang menjadi responden penelitian kurang memadai pemahaman dan implementasinya di sekolah. Penelitian yang fokus pada dimensi evaluasi juga menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 belum efektif baik pada perencanaan, pe-laksanaan, dan pelaporan (Setiadi, 2016, p. 176).

Walau begitu, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Mastur (2017, p. 63) misalnya menyimpulkan bahwa impelementasi Kurikulum 2013 pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Yogyakarta sudah berjalan secara efektif karena sudah sesuai dengan harapan. Hal ini dapat di-lihat dari penerapan pendekatan saintifik serta penggunaan penilaian otentik. Walaupun juga diakui pada temuan penelitian tersebut bahwa impelementasi Kurikulum 2013 masih ditemu-kan banyak kendala. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian secara komprehensif terkait efektivitas implementasi Kurikulum 2013 dari berbagai jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada fakta tersebut, perlu kajian secara lebih lanjut agar dapat memberi-kan gambaran lebih luas mengenai implemen-tasi Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah. Beberapa penelitian yang telah diulas sebelumnya baru fo-kus pada beberapa sekolah secara terpisah den-gan tujuan penelitian yang agak berbeda satu sama lain. Belum memberikan gambaran secara lebih luas pada beberapa sekolah sekaligus da-lam satu riset yang padu. Oleh karena itu, perlu penelitian yang lebih luas untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Hal ini penting mengingat kebijakan untuk mengubah dan memperbaiki kurikulum, termasuk Kuri-kulum 2013, perlu sumbangan banyak riset yang sifatnya meluas cakupannya.

Dalam hal ini peneliti fokus di Jawa Ten-gah, terutama pada beberapa Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah di wilayah utara dan selatan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan data dan fakta mengenai kesiapan guru, daya dukung sekolah, pemerintah daerah, dan berbagai kendala serta solusi yang telah dilakukan pada beberapa daerah di Jawa Tengah dalam implementasi Kurikulum 2013. Kiranya penelitian ini akan dapat memperkaya data dan informasi, serta memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi Kurikulum 2013 beserta kendala-kendalanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed method*) antara kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian terdapat data dan informasi yang bersifat kuantitatif, di sisi lain terdapat juga yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena lingkup atau jangkauan penelitian relatif luas, sehingga data dan informasi yang diinginkan akan mudah diperoleh menggunakan pendekatan kuantitatif. Di sisi lain penggalian identifikasi gejala masalah dan informasi-informasi yang kaya memerlukan dukungan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 5 bulan pada akhir tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) di Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan Kurikulum 2013, sedangkan sampel penelitian diambil dengan teknik *cluster random sampling*, untuk masing-masing jenjang pendidikan 1 sampel terdiri dari 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA/SMK di 6 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang masing-masing mewakili eks karesidenan di Provinsi Jawa Tengah. Kelima kabupaten/kota tersebut adalah Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Jumlah responden 90 orang terdiri dari 6 orang perkabupaten per jenjang pendidikan. Responden terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, maka teknik dan/atau alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan wawancara. Angket, digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan kurikulum terhadap ide dasar Kurikulum 2013 dan terhadap isi dokumen/perangkat Kurikulum 2013, keterlaksanaan isi dokumen/perangkatnya, dan faktor pendukung dan penghambat, baik melalui pertanyaan terbuka (*open question*) maupun tertutup (*close question*). Wawancara, digunakan

untuk mendukung pengungkapan seluruh variabel penelitian, terutama masukan-masukan dari stakeholders dalam rangka merumuskan langkah-langkah pemecahan dalam penerapan Kurikulum 2013.

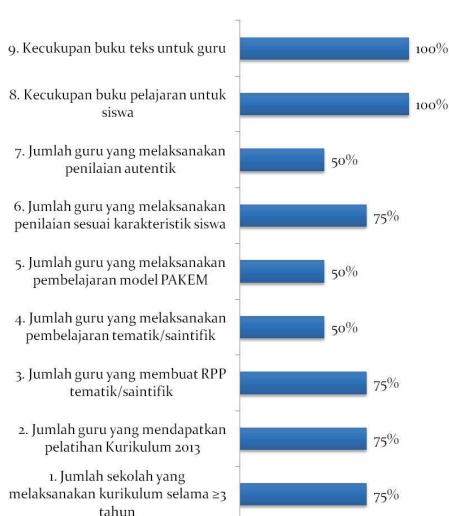
Analisis data penelitian ini menggunakan gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase untuk mengetahui kesiapan implementasi kurikulum 2013. Analisis kualitatif untuk mengetahui efektivitas implementasi kurikulum 2013. Dalam hal ini wawancara juga dijadikan sebagai cara/alat untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menguatkan beberapa penelitian terdahulu, bahwa Kurikulum 2013 memang belum terimplementasikan dengan baik di sekolah-sekolah, terutama di Jawa Tengah. Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa secara umum belum semua sekolah menerapkan Kurikulum 2013, padahal sudah lebih dari tiga tahun kurikulum nasional ini diresmikan oleh pemerintah. Fakta lain juga menunjukkan bahwa belum semua guru memperoleh pelatihan, termasuk banyak guru mengaku belum menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik, juga belum menerapkan penilaian otentik untuk mengukur hasil belajar siswa-siswinya.

Namun demikian kecukupan buku pelajaran untuk murid telah mencapai 100%, demikian juga buku untuk guru telah mencapai 100%. Hal ini karena pemerintah telah menyediakan buku dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* yang dapat diunduh dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Penyediaan buku elektronik oleh pemerintah telah membantu sekolah-sekolah dalam mendapatkan buku untuk siswa dan buku untuk guru. Hal ini sangat membantu sekolah-sekolah terpencil atau pinggiran yang selama ini mengalami kendala keterlambatan pengiriman buku siswa atau buku guru. Selengkapnya hasil data kuantitatif untuk setiap indikator yang diteliti dapat dilihat pada gambar 1.

Data pada gambar 1 hanyalah data di permukaan, karena penelitian ini belum menukik secara detail terkait bagaimana pemahaman guru dalam implementasi Kurikulum 2013. Seringkali kurikulum yang tertulis di dalam berbagai dokumen kebijakan ternyata masih sulit dipahami oleh para guru. Inilah yang meny-



Gambar 1 Implemetasi Kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah

babkan terjadinya distorsi dari yang diharapkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang ada di tingkat kelas. Hal ini juga terjadi di Swedia sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Bergqvist dan Bergqvist (2017, p. 149) yang menunjukkan bahwa kurikulum formal yang ditulis dengan menggunakan kata dan kalimat yang kompleks membuat para guru kurang jelas dalam memahaminya. Artinya apa yang telah ditulis dalam dokumen kurikulum yang dikeluaran oleh pemerintah, belum tentu dapat dilaksanakan oleh para guru. Karena masing-masing guru memiliki persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda tentang isi dan proses kurikulum.

Data dan perhitungan kuantitatif tersebut kemudian penelitian padukan dengan wawancara kepada beberapa guru, kepala sekolah, dan pengawas secara acak. Fokus wawancara ini untuk menjawab 5 (lima) hal, yaitu (1) kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013, (2) dukungan sekolah dalam implementasi Kurikulum 2013, (3) dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam implementasi Kurikulum 2013, (4) faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum 2013, dan (5) langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekolah.

Lima pertanyaan tersebut akan menjawab mengapa implementasi Kurikulum 2013 selama ini daerah belum optimal. Terutama diihat dari sisi manajerial yang melibatkan guru dan berbagai komponen terkait, baik di lingkungan internal sekolah maupun eksternal hingga ke para pemangku kepentingan dan pemerintah. Berikut di bawah ini uraian lebih lengkapnya.

A. Kesiapan guru dalam implementasi Kurikulum 2013

Berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar guru merasa belum siap mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan alasan belum memahami hakikat Kurikulum baru tersebut. Kurangnya pemahaman guru disebabkan karena pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Provinsi, bahkan pemerintah di level nasional tidak didesain dengan baik. Beberapa informan menyatakan bahwa terkesan pelatihan diselenggarakan secara asal-asalan, misalnya waktu pelaksanaan pelatihan sering dipadatkan atau waktu pelatihan sampai malam hari sehingga besok pagi sudah tidak ada materi lagi.

Kurangnya pemahaman guru terhadap hakikat Kurikulum 2013 ini menguatkan temuan penelitian Melati dan Utanto (2016). Dalam penelitian ini sebagian besar guru belum memiliki pengetahuan cukup untuk memahami Kurikulum 2013 secara utuh dan belum siap melaksanakannya. Guru juga memiliki hambatan dalam pelatihan yang diperoleh belum memadai, sehingga guru belum mampu melaksanakan pembelajaran sesuai yang diharapkan dalam Kurikulum 2013. Kedua penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda, namun hasilnya sama, yaitu guru belum paham akan hakikat Kurikulum 2013, bahkan yang sudah dilatihpun merasa belum paham karena pelatihan tidak diselenggarakan dengan baik.

Beberapa kendala lain yang ditemukan Melati dan Utanto (2016, p. 6) adalah minimnya dokumen kurikulum, buku Kurikulum 2013, dan pelatihan yang baik intensitas dan kualitasnya tidak maksimal. Dalam praktik implementasi Kurikulum 2013 dalam membuat persiapan pembelajaran, guru tidak membuat RPP. Sebagian besar guru dalam persiapan pembelajaran berbekal materi yang ada dalam buku siswa. Melihat kondisi ini, yang perlu diperbaiki adalah mentalitas para guru, bukan perubahan kurikulum. Hal ini sesuai dengan kesimpulan penelitian tersebut yang menyatakan bahwa solusi yang dilakukan selama ini antara lain dengan mengikuti pelatihan, belajar dan menggali informasi dari internet atau sumber yang lebih mengetahui Kurikulum 2013.

Informasi dari para guru yang lebih detil diperoleh oleh peneliti. Mereka mengatakan bahwa pelatihan Kurikulum 2013 diberikan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip belajar yang baik, karena pelatihan dilakukan dari pukul 08.00 WIB

hingga pukul 22.00 WIB (malam). Para guru yang mengikuti pelatihan ini merasa tidak bisa menyerap materi dengan maksimal, apalagi jika pesertanya sudah berusia lanjut. Para instruktur dari provinsi dan kabupaten pun banyak yang belum berpengalaman menerapkan kurikulum ini, karena mereka hanya menerima pelatihan sebelumnya saat mengikuti pelatihan tingkat nasional. Akibatnya banyak instruktur yang hanya paham dalam konsep, sehingga contoh-contoh yang diberikan tidak aplikatif. Apalagi ada instruktur yang menyatakan belum paham betul akan hakikat kurikulum ini.

Temuan ini sejalan dengan temuan Ruja dan Sukamto (2015, p. 199) sebelumnya yang juga menunjukkan implementasi Kurikulum 2013 belum efektif dilaksanakan. Setidaknya terdapat tiga alasan yang menunjukkan implementasi Kurikulum 2013 belum efektif, yaitu (1) guru merasa belum siap karena sosialisasi dan pelatihan terlalu singkat, (2) pelatihan yang terlalu singkat tersebut mengakibatkan guru belum bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan (3) ketidaksiapan guru juga ditunjukkan dalam penilaian terhadap hasil belajar siswa.

Terkait dengan materi yang belum dipahami oleh para guru tersebut, sebagian besar mengerucut pada 3 (tiga) fakta berikut ini. Guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebagian besar menyatakan belum paham mengenai pembelajaran tematik, buahnya adalah mereka tidak dapat melaksanakannya di sekolah. Berikutnya, guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagian besar juga menyatakan belum paham pendekatan pembelajaran saintifik. Lebih dari itu, sebagian besar para guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA menyatakan belum memahami cara penilaian hasil pelajar menggunakan penilaian otentik.

Sebenarnya, berdasarkan wawancara terhadap para guru, mereka sangat berharap agar mereka mendapatkan pendampingan setelah selesainya pelatihan. Pendampingan bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas atau instruktur kabupaten. Hal tersebut karena menurut mereka kunci keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran bukan pada pelatihannya, melainkan pada pendampingannya. Oleh karena itu, menurut mereka para kepala sekolah dan pengawas sekolah juga harus dilatih Kurikulum 2013 agar mereka juga dapat mendampingi para guru.

Perubahan dan pengembangan kurikulum di Indonesia dengan menerapkan Kuriku-

lum 2013 sebenarnya menuju ke arah yang benar. Karena dalam Kurikulum 2013 yang menjadi perhatian utama adalah siswa dan guru mendapatkan otonomi untuk membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakannya. Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 (tiga) kecenderungan umum dalam pembaruan kurikulum. *Pertama*, menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* untuk perencanaan kurikulum. *Kedua*, memposisikan peserta didik sebagai pusat kegiatan kurikulum sekolah. *Ketiga*, memberikan otonomi dan profesionalisme kepada guru seperti yang terjadi di Amerika Utara, Inggris, dan Selandia Baru (Priestley, 2011, p. 221).

Dalam rangka mendukung perubahan kurikulum baru ini, maka pemerintah juga meluncurkan program baru yang bernama bernama Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yaitu program yang didesain untuk terus meningkatkan otonomi dan profesionalisme para guru di sekolah-sekolah. Harapannya siswa-siswi di sekolah memperoleh layanan pendidikan yang betul-betul berkualitas dari para guru yang juga berkualitas. Program PKB mencakup berbagai cara dan strategi untuk meningkatkan kualitas para guru di sekolah melalui pendampingan dan pelatihan-pelatihan (Kemendiknas, 2010).

B. Dukungan sekolah dalam implementasi Kurikulum 2013

Peneliti juga memperoleh banyak informasi dari para informan di sekolah bahwa dukungan warga sekolah untuk implementasi kurikulum ini dirasa kurang, walau mereka juga menyatakan menyambut baik Kurikulum 2013. Rendahnya dukungan ini karena mereka belum tahu apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam memberikan dukungan demi suksesnya implementasi kurikulum ini. Oleh karena itu, menurut mereka perlu segera dilakukan pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan tenaga administrasi mengenai Kurikulum 2013.

Lebih lanjut, menurut hemat peneliti, dalam implementasi kurikulum yang diperlukan adalah inovasi program pemberajaran. Inovasi seperti ini akan muncul jika di sekolah terdapat kepemimpinan kepala sekolah yang visioner. Kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik yang memungkinkan para guru bekerja dengan nyaman terutama dalam rangka mengembangkan berbagai perangkat persiapan mengajar kurikulum baru. Oleh karena kuriku-

lum yang akan diimplementasikan adalah kurikulum baru, maka wajar jika guru memerlukan waktu lebih banyak dari biasanya untuk membuat RPP dan media pembelajaran.

Sebagaimana telah peneliti ungkapkan sebelumnya, ternyata walau Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) tahun, kenyataannya masih banyak guru yang belum dapat membuat RPP sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Hal ini menguatkan hasil penelitian (Siambaton et al., 2016, p. 10) yang menyatakan bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 para guru di SMP yang diteliti oleh mereka belum dapat menyiapkan RPP sesuai dengan ketentuan baku dari kebijakan Kurikulum 2013. Namun anehnya guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan siswa menerima dengan baik materi yang disampaikan guru.

Penelitian Siambaton dan kawan-kawan (2016, p. 15) juga mengungkapkan kendala dalam hal perencanaan pembelajaran mata pelajaran IPS Kelas VII berbasis Kurikulum 2013, yakni dalam membuat RPP guru membutuhkan waktu dan kemauan yang kuat untuk segera menyelesaikan tugas administratifnya karena memang RPP yang dibuat didasarkan pada kurikulum baru yang harus dipelajari dan dipehami secara tepat terlebih dulu. Hal ini senada dengan temuan penelitian ini yaitu memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat RPP dan media pembelajaran.

Suherman (2014, p. 71) juga menemukan bahwa implementasi Kurikulum 2013 belum efektif karena sarana prasarana sekolah belum lengkap. Oleh karena itu dalam penelitiannya, Seherman menyatakan agar sekolah dan pihak-pihak terkait dapat melengkapi sarana sekolah agar pembelajaran lebih berkualitas dan hasil belajar bisa maksimal.

Peneliti sepakat bahwa memang diperlukan peran kepemimpinan kepala sekolah untuk selalu responsif dan memunculkan inisiatif-inisiatif kreatif dalam menghadapi perubahan yang terjadi di sekolah, termasuk hadirnya kurikulum baru. Kepala sekolah harus mampu mengubah pola pikir guru agar terus belajar dan belajar baik di dalam lingkup sekolah sendiri atau melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Jangan sampai ada kebijakan yang keliru yang dikeluarkan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin terkait pengembangan profesionalisme guru dalam mengajar. Demikian pula kebi-

jakan ditingkat yang lebih tinggi seperti Kepala Dinas Pendidikan atau Bupati agar tidak melarang guru untuk mengikuti KKG atau MGMP.

Selain itu para guru hendaknya juga menerapkan model-model pembelajaran yang membuat siswa bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Di antaranya adalah penggunaan model *discovery learning*. Berdasarkan hasil penelitian Dina, Mawarsari, dan Suprapto (2015, p. 30) penggunaan model pembelajaran *discovery learning* dengan pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa SMK. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan model *discovery learning* dan menggunakan pendekatan saintifik pada materi geometri—yang diteliti oleh Dina dan kawan-kawan—terbukti lebih baik dibandingkan kemampuan komunikasi matematis yang menggunakan model konvensional. Kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan hendaknya mengadakan pelatihan secara mendalam model dan pendekatan pembelajaran yang efektif ini.

C. Dukungan pemerintah daerah dalam implementasi Kurikulum 2013

Sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa Kurikulum 2013 diterapkan disemua jenjang pendidikan secara bertahap, Pemerintah Daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk itu. Terlihat mulai tahun anggaran 2014 pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk pelatihan guru dan pengadaan buku dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, pada tahun 2015 dan 2016 anggaran untuk implementasi Kurikulum 2013 semakin besar, karena semakin banyak peserta yang akan dilatih dan pengadaan buku juga semakin besar. Karena pelatihan juga tidak hanya diberikan kepada guru, melainkan juga kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bahkan di beberapa kabupaten, anggaran tahun 2015 dan 2016 telah dialokasikan untuk mendampingi guru-guru dalam mengajar di kelas dalam rangka mengevaluasi apakah sudah sesuai yang diinginkan oleh Kurikulum 2013 atau belum.

Pihak-pihak yang akan menerima sosialisasi juga akan makin banyak. Komite sekolah dan orang tua menjadi sasaran berikutnya yang akan menerima sosialisasi Kurikulum 2013. Diharapkan tenaga administrasi sekolah dan orang

tua juga mendapatkan sosialisasi ini agar mereka juga bisa memberikan dukungan dalam implementasi kurikulum baru ini.

Namun penggunaan APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk pendidikan harus sangat hati-hati, karena begitu bersarnya persentase APBD dan APBD untuk pendidikan. Bank Dunia (2007) membuat estimasi bahwa anggaran pendidikan secara nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini karena terus meningkatnya anggaran untuk tunjangan guru di daerah terpencil dan tunjangan profesi guru. Anggaran pendidikan tahun 2015 diestimasikan mencapai 80 triliun rupiah dan pada tahun 2016 mencapai 100 triliun rupiah.

Penggunaan anggaran pendidikan yang besar harus digunakan secara efisien dan efektif, karena sebagian besar belanja pendidikan hanya untuk gaji pegawai. Pada tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk belanja rutin sebesar 96% digunakan untuk gaji. Sementara itu 4% sisanya untuk kegiatan operasional dan kecenderungan semacam ini juga tampak pada penggunaan anggaran pendidikan (World Bank, 2007).

D. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum 2013

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi Kurikulum 2013 di lapangan, yaitu (1) penganggaran yang jelas dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi Kurikulum 2013, (2) koordinasi yang baik dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi dengan pemerintah pusat dalam pengadaan sarana pembelajaran dan pelatihan, perencanaan yang baik, dan (3) tersediaan sarana pembelajaran lainnya seperti LCD dan sambungan internet.

Temuan ini senada dengan penelitian Mastur (2017, p. 63) di Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 walaupun sudah berjalan dengan efektif namun tetap terdapat beberapa kendala seperti, antara lain pendekatan tematik tidak sesuai dengan mata pelajaran IPA, penambahan materi banyak sebaliknya waktunya sedikit, banyaknya kesalahan pada isi Kurikulum 2013, dan keterlambatan buku siswa dan buku guru.

Hambatan lain dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah dalam hal penilaian hasil

belajar sebagaimana disimpulkan dari penelitian Setiadi (2016, p. 176). Dalam perencanaan penilaian hasil belajar masih muncul kendala, yaitu guru belum mengerti kisi-kisi soal dan kegunaannya, guru belum paham dalam menganalisis instrumen penilaian, serta guru belum paham cara membuat pedoman penskoran. Dalam tahap pelaksanaan, banyak juga guru yang mengalami kesulitan dalam penilaian sikap, penilaian tematik, dan kesulitan merevisi butir soal. Dalam pelaporan banyak guru yang mengalami kesulitan dalam membuat skala penilaian 1-4 serta kesulitan dalam menulis di buku rapor.

Semua yang disebutkan di atas tidak akan dapat berjalan secara maksimal jika sumber daya manusia di sekolah terutama guru dan kepala sekolah tidak mengubah perilakunya. Guru harus semangat dan mengubah pola pikir dalam pembelajaran, bahwa siswalah yang harus aktif belajar dan pembelajaran harus menyenangkan bagi siswa. Kepala sekolah harus inovatif dan responsif dengan menciptakan peluang-peluang bagi guru agar terus mengembangkan profesionalisnya dalam mengajar. Ketiadaan faktor-faktor pendukung di atas akan memunculkan hambatan dalam implementasi Kurikulum 2013.

Berikutnya berkaitan dengan ketersediaan sarana pembelajaran, walau keberadaan buku sudah cukup, namun perlu ada evaluasi lebih lanjut apakah isi buku-buku pelajaran tersebut sudah berdimensi global? Jika belum, maka Kurikulum 2013 akan tertinggal dari negara-negara lain. Berdasarkan pengalaman di Taiwan, ditemukan hanya sekitar 10% konten buku teks substansinya memuat materi yang berdimensi global. Konsep pendidikan global—yakni yang mengaitkan materi dengan konteks pergaulan internasional dalam skala global—yang sudah masuk dalam buku pelajaran adalah keberlanjutan ekologis dan perdamaian dunia, sedangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial kurang terwakili (Chou & Ting, 2016, p. 533).

D. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala implementasi Kurikulum 2013

Berdasarkan pada temuan penelitian tersebut, beberapa hal yang urgent dilakukan antara lain adalah perbaikan manajemen implementasi Kurikulum 2013. Sebisa mungkin pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersama-sama menetapkan target berapa sekolah yang akan mengimplementasikan dalam kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun mendatang. Siklus implementasi Kurikulum 2013 harus di-

buat mulai dari penganggaran, pengadaan sara pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi keberhasilan dan kegagalannya.

Target tersebut harus disusul dengan rencana penganggaran untuk pengadaan buku pelajaran murid, buku pegangan guru, biaya pelatihan untuk guru, pelatihan kepala sekolah, pelatihan pengawas sekolah, sosialisasi kepala komite sekolah dan orang tua siswa. Anggaran juga harus disiapkan secara komprehensif termasuk untuk pendampingan guru saat mengajar di kelas.

Pengadaan buku sebaiknya tidak dilakukan secara terpusat, melainkan dilakukan secara desentralistik baik menurut regional maupun menurut provinsi. Hal ini untuk menghindari keterlambatan proses pencetakan dan pengiriman ke kabupaten-kota yang selama ini terjadi.

Berikutnya, pelatihan sebaiknya dilakukan secara berjenjang dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelatihan dilakukan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik dan diberikan oleh para instruktur yang berpengalaman dalam implementasi kurikulum. Tidak sekadar memenuhi formalitas datang ke tempat pelatihan, ada pelatihan, dan pulang dengan begitu mendapat uang saku.

Pelatihan guru pun hendaknya lebih banyak difokuskan pada pendekatan tematik untuk guru SD, dan pendekatan saintifik untuk guru SMP dan SMA/SMK, karena hal-hal itulah yang sebagian besar dikeluhkan oleh para guru yang menjadi informan penelitian ini di lapangan. Pedoman penilaian untuk guru dalam memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa juga harus segera diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan akan diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

SIMPULAN

Berdasarkan pada temuan penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat peneliti simpulkan beberapa hal berkaitan dengan implementasi Kurikulum 2013 di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Batang, Sragen, Banjarnegara, dan Kebumen. Sebagai penelitian kuantitatif yang dipadu dengan investigasi kualitatif, maka temuan penelitian ini kiranya dapat dipahami sebagai gambaran yang bisa jadi terjadi juga di beberapa daerah lain. Dengan demikian hasil dan pembahasan dalam artikel ini berguna sebagai

penguatan bagi para pengambil kebijakan untuk segera mengatasi masalah implementasi Kurikulum 2013 yang betul-betul terjadi di lapangan, terutama di beberapa daerah fokus penelitian ini di Jawa Tengah.

Penelitian ini secara umum menguatkan beberapa temuan penelitian terdahulu, bahwa implementasi Kurikulum 2013 belum berjalan dengan efektif, dikarenakan beberapa hal di bawah ini.

Pertama, belum semua guru mendapatkan pelatihan, banyak guru yang belum bisa menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik, serta banyak guru yang belum bisa melakukan penilaian autentik. *Kedua*, guru belum memahami substansi kurikulum sehingga tidak bisa menerapkannya dengan baik. Kelemahan utama guru dalam pembelajaran adalah kurangnya pemahaman pendekatan tematik saintifik dan penilaian terhadap hasil belajar siswa.

Ketiga, dukungan sekolah masih rendah karena belum banyak warga sekolah yang mendapatkan pelatihan kurikulum ini. Penyebab utama rendahnya dukungan sekolah karena kurangnya pemahaman warga sekolah tentang kurikulum baru ini, terutama kepala sekolah dan pengawas sekolah. *Keempat*, Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran pelatihan, anggaran pendampingan, anggaran pengadaan buku, dan mengirimkan para guru-kepala sekolah-pengawas sekolah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun kurang optimal hasilnya.

Kelima, kurang matangnya perencanaan dalam implementasi Kurikulum 2013 ini akan menjadi faktor penghambat. Koordinasi yang lemah antara berbagai jenjang pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap implementasi kurikulum juga mendjadi kelemahan lain. *Keenam*, manajemen implementasi kurikulum harus diperbaiki mulai dari penentuan target implementasi, penganggaran, pengadaan sara pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Di era desentralisasi mestinya implementasi kurikulum juga dilakukan secara desentralistik. Kunci utamanya koordinasi yang baik antar berbagai jenjang pemerintahan dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Saran-saran untuk perbaikan dalam implementasi Kurikulum 2013 dengan memper-

hatikan kelemahan-kelemahan di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, perlu adanya perencanaan yang matang mulai penentuan target, penganggaran, pengadaan sarana, pelatihan, implementasi dan pendampingan, serta evaluasi. *Kedua*, meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelatihan terhadap guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Termasuk di antaranya adalah koordinasi dalam pengadaan buku dan proses pengirimannya hingga ke sekolah-sekolah sehingga tidak mengalami keterlambatan.

Ironisnya, ketika Kurikulum 2013 belum sepenuhnya dapat diterapkan secara menyeluruh oleh semua sekolah, pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru sudah wacana baru pergantian kurikulum. Harapannya semoga perubahan atau perbaikan kurikulum nanti tidak sekadar terkait isu politik yang terjadi tiap lima tahunan. Karena perubahan kurikulum di Indonesia selama ini kental dengan isu politik, yakni “ganti menteri, ganti kurikulum”. Berdasarkan kajian Abong (2015, p. 37) kurikulum di Indonesia memang selalu berhubungan dengan konstelasi kekuasaan, dan oleh karena itu arah dan substansi kurikulum ditentukan oleh keputusan otoritas negara dan subsistem non-negara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang yang mendanai penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para responden dari setiap kabupaten/kota yang telah mengisi angket dan menjadi informan dalam penelitian implementasi Kurikulum 2013 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abong, R. (2015). Konstelasi Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *At-Turats*, Vol. 9 Nomor 2: 37-47.
- Bergqvist, E. & Bergqvist, T. (2017) The role of the formal written curriculum in standards-based re-form. *Journal of Curriculum Studies*, 49(2): 149-168. doi.org/10.1080/00220272.2016.1202323.
- Chou, P.I. dan Ting, H.J. (2016). How closely related are the national curriculum and the global dimension? A content analysis of the global dimension in elementary school text-books in Taiwan. *Asia Pacific Education Review*, 17(3): 533-543. doi.org/10.1007/s12564-016-9437-6.
- Dikbud. (2013). Nomor 5, Tahun IV, September 2013.
- Dina, A., Mawarsari, V.D., dan Suprapto, R. (2015). Implementasi Kurikulum 2013 pada Perangkat Pembelajaran Model Discovery Learning Pendekatan Scientific terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Geometri SMK. *JKPM*, 2(1): 22-31.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Buku 1: Pedoman Pengelolaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)*. Jakarta: Kemdiknas, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
- Mastur. (2017). Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pelaksanaan Pembelajaran di SMP. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 4(1): 50-64.
- Melati, E.R., dan Utanto, Y. (2016). Kendala Guru Sekolah Dasar dalam Memahami Kurikulum 2013. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 4(1): 1-9.
- Ormond, B.M. (2017). Curriculum decisions—the challenges of teacher autonomy over knowledge selection for history. *Journal of Curriculum Studies*, 49(5): 599-619. doi.org/10.1080/00220272.2016.1149225.
- Priestley, M. (2011). Whatever happened to curriculum theory? Critical realism and curriculum change. *Pedagogy, Culture & Society*, 19(2): 221-237.
- Ruja, I.N. dan Sukamto. (2015). Survey Permasalahan Implementasi Kurikulum Nasional 2013 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Pertama di Jawa Timur. *Sejarah dan Budaya*, Tahun Kesembilan, 2(2): 193-199.
- Samsudi. (2009). *Desain Penelitian Pendidikan*. Semarang: Unnes Press.
- Setiadi, H. (2016). Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(2): 166-178.
- Siambaton, H.R., Erlinawati, dan Haryanto. (2016). Problem Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial di Jenjang Sekolah Menengah Pertama. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 4(1): 10-16.
- Subekti, A., Yudha, S.S., dan Budisantoso, H.T. (2016). Pemahaman dan Peran Guru TIK dalam Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 4(1): 25-31.
- Suherman, A. (2010). Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani: Studi Deskriptif Kualitatif Pada SDN Cilengkrang. *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(1): 71-76.
- World Bank. (2007). *Investing in Indonesia's Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditures*. The World Bank Policy Research Working Paper 4329. Diakses dari <http://hdl.handle.net/10986/7280>.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.